



LAPORAN KINERJA


TAHUN 2023




**KPKNL
PONTIANAK**

 Jl Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak

 djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak

 kpknlpontianak@kemenkeu.go.id

 (0561) 735269

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan upaya pewujudan *good governance* dalam bentuk sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan visi dan misi KPKNL Pontianak yang melandasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut KPKNL Pontianak mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja kuantitatif/kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak dalam mewujudkan *good governance* serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang diembankan kepada KPKNL Pontianak pada Tahun Anggaran 2023.

Pontianak, 17 Januari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Ringkasan Perjanjian Kinerja	6
1. Peta Strategi.....	6
2. Sasaran Strategis (SS)	7
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
4. Kegiatan Kerja	8
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak.....	11
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2023.....	11
2. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya.....	12
3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja.....	17
5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran.....	19
C. Prestasi dan Penghargaan	20
BAB IV PENUTUP	21
A. Keberhasilan Pencapaian IKU	21
B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja.....	21
C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang.....	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN)

Dalam rangka membantu sebagian tugas Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak sebagai unit operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang dengan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tujuan yang ingin dicapai KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
2. Memberikan pelayanan penilaian berupa proses penilaian BMN/BMD/barang jaminan Piutang Negara;
3. Mengembangkan serta meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan pengurusan Piutang Negara;

4. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan di bidang Lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendorong upaya optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang negara.
6. Mensosialisasikan dan mempublikasikan edukasi dan kegiatan mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pelayanan penatausahaan BMN dan terciptanya *database* di bidang pengelolaan kekayaan negara;
2. Tercapainya pelayanan di bidang penilaian BMN/D dan barang jaminan piutang negara;
3. Tercapainya target penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
4. Terciptanya mekanisme pengelolaan BMN serta barang jaminan piutang negara yang efektif dan efisien;
5. Terselenggaranya pelaksanaan lelang yang efektif dan efisien;
6. Terselenggaranya Edukasi dan Komunikasi yang baik dengan *stakeholder*;
7. Tersedianya data dan informasi yang andal mengenai piutang negara dan lelang;
8. Penanganan kasus/perkara pengadilan secara profesional;
9. Tersedianya SDM yang andal dan berkualitas.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan 19 Program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dari RKT tersebut, pada akhir tahun dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). KPKNL Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Hambatan – hambatan yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

- 1). Pada capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran beban kinerja yang tersaji melalui Rincian Output (RO) di tiap seksi dan MAK Umum cukup tinggi, sementara dukungan anggaran perlu memerhatikan capaian efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa RO yang sudah tidak dapat terakomodir dengan dukungan anggaran
- 2). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal

- 3). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.
- 4). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN akan sulit tercapai.
- 5). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBPN.
- 6). Letak barang jaminan Piutang Negara tidak dapat teridentifikasi secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai.
- 7). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 8). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 9). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 10). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
- 11). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
- 12). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
- 13). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 14). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 15). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.

- 16). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 17). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena permohonan sangat tergantung dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 18). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan e-auction masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.
- 19). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat gugatan perdata, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang. Sebagian putusan pengadilan menyatakan pembatalan risalah lelang sehingga risiko hukum ini menjadi kendala bagi KPKNL Pontianak dalam melaksanakan proses lelang.
- 20). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di bebankan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia
- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbuan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;

- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.
- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan stakeholder terkait pelayanan pada KPNKNL Pontianak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kanwil DJKN Kalimantan Barat, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sebagai unit vertikal di bawah DJKN, KPKNL Pontianak selalu berupaya untuk mewujudkan visi DJKN dan menjalankan misi DJKN dengan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/*stakeholders* dan berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Di samping itu KPKNL menyelenggarakan fungsi :

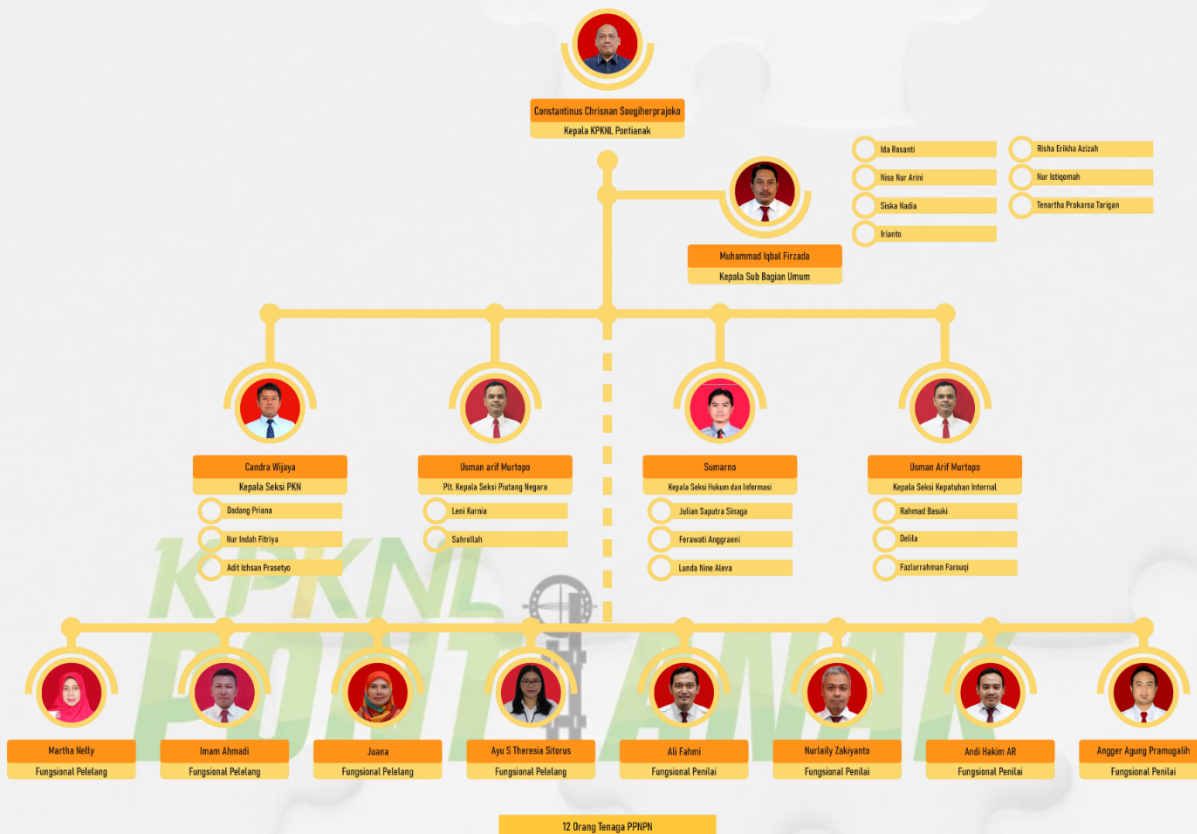
1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka KPKNL Pontianak merupakan Kantor Pelayanan yang terdiri atas:

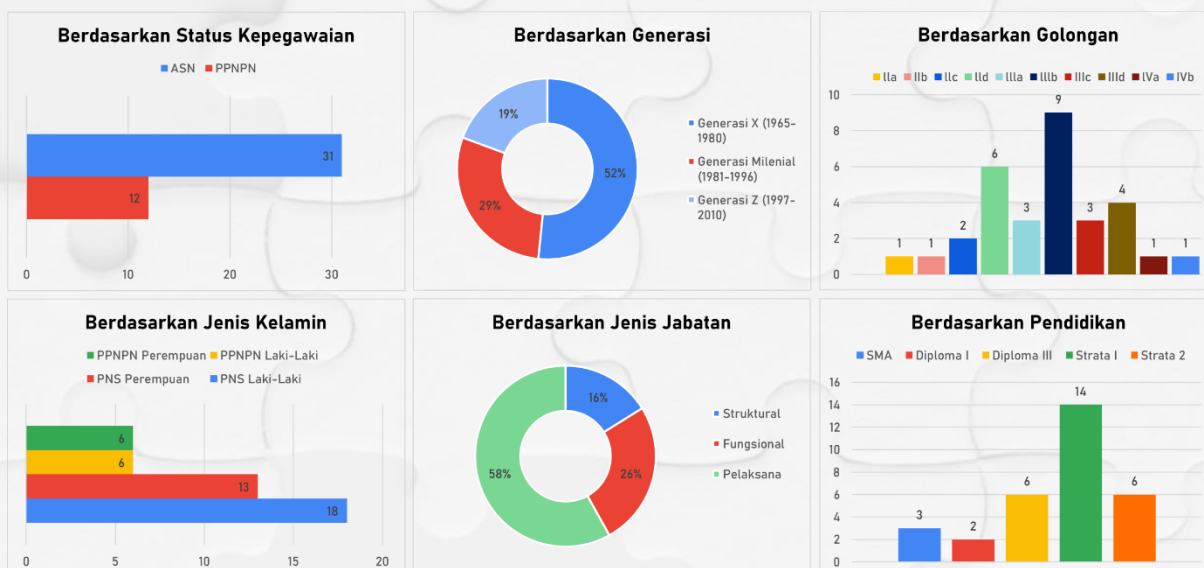
- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

berikut bagan struktur organisasi pada KPKNL Pontianak :



Berikut merupakan grafis sebaran pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, Generasi, Jenis Jabatan, Golongan dan Pendidikan:



B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam Upaya mewujudkan tugas dan fungsi KPKNL. KPKNL Pontianak mengemban visi : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Pontianak menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 6) Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya peningkatan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, sistem pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang transparan yang akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih dan bebas KKN yang akan menjadikan KPKNL dibanggakan masyarakat sehingga KPKNL mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN yang berasal dari pengorbanan masyarakat.

Guna mewujudkan pertanggungjawaban, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2023 diharapkan akan lebih mendorong semangat kerja setiap pegawai KPKNL Pontianak. Dengan demikian maka sasaran tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Kekayaan Negara dan Piutang Negara sebagai bagian dari keuangan negara harus dikelola dengan cepat, efisien dan efektif sehingga kemacetan likuiditas dana pemerintah dapat teratasi secara optimal. Dengan demikian KPKNL memegang peranan yang penting dan strategis dalam upaya menyelamatkan Keuangan Negara.

KPKNL sebagai lembaga khusus yang mengurus piutang Negara dan setelah reorganisasi maka tugas khusus KPKNL adalah dibidang pengelolaan Kekayaan Negara dan penilaian barang milik negara, namun tugas dibidang piutang negara dan lelang masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatannya masih rentan terhadap timbulnya permasalahan hukum terutama dalam memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat. Risiko hukum ini terjadi karena KPKNL Pontianak melaksanakan lelang berdasarkan kelengkapan dokumen formal yang menyertainya, sementara riwayat objek lelang dan riwayat perjanjian yang dilaksanakan oleh pemohon tidak diketahui secara jelas oleh Pejabat Lelang. Meskipun dalam dokumen permohonan terdapat surat pernyataan bahwa Pejabat Lelang bebas dari tuntutan hukum jika terjadi sesuatu, namun dalam praktiknya setiap gugatan atau permasalahan hukum selalu menyertakan pihak KPKNL/Pejabat Lelang.
2. Masih terdapat ketidaktaatan dari satuan kerja KPKNL Pontianak dalam pemanfaatan, pelaporan BMN *idle*, dan penyampaian wasdal yang tepat waktu. *Update* sertifikasi BMN tidak dilaporkan secara berkala ke KPKNL Pontianak sehingga data yang ada pada KPKNL Pontianak seringkali tidak valid. Sementara itu pencapaian sertifikasi tanah BMN juga terhambat dengan kelengkapan data yuridis sehingga meskipun sudah dilakukan pengukuran namun sertifikat belum bisa terbit, proses inilah yang menghambat proses sertifikasi sampai kelengkapan data yuridis bisa dipenuhi. Untuk satker-satker tidak menyampaikan kondisi BMNnya yang *idle* ke pengelola (KPKNL), meskipun berdasarkan pengamatan dan informasi masyarakat bahwa BMN yang bersangkutan nyata-nyata *idle*. Selain itu untuk penyampaian laporan wasdal oleh satker ke KPKNL Pontianak sering terlambat akibatnya laporan wasdal ke Kanwil juga terlambat.
3. Capaian kualitas pelaksanaan anggaran memerlukan akselerasi penggunaan anggaran dengan menetapkan persentase besaran efisiensi 10% untuk setiap MAK sehingga secara periodik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap MAK. Hal ini bertujuan agar

penyerapan dan efisiensi anggaran optimal serta memastikan seluruh RO terakomodir dengan dukungan anggaran yang tersedia.

4. Kesesuaian antara penyerapan dan efisiensi anggaran masih menjadi *issue* yang memerlukan perhatian dan pengawasan
5. Jumlah Pegawai dan beban kerja yang tidak berimbang membuat pegawai harus bekerja ekstra dan membuat pergerakan pegawai kurang optimal guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.



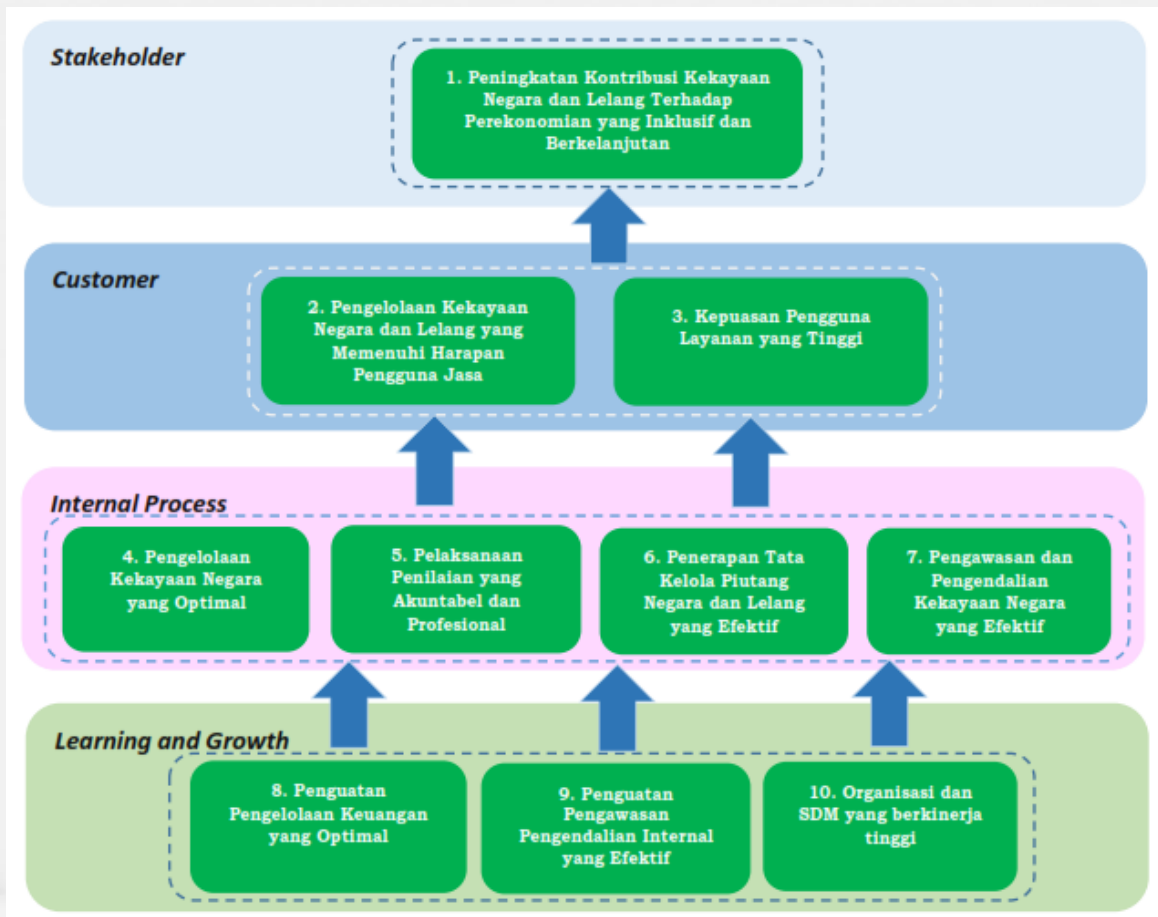
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

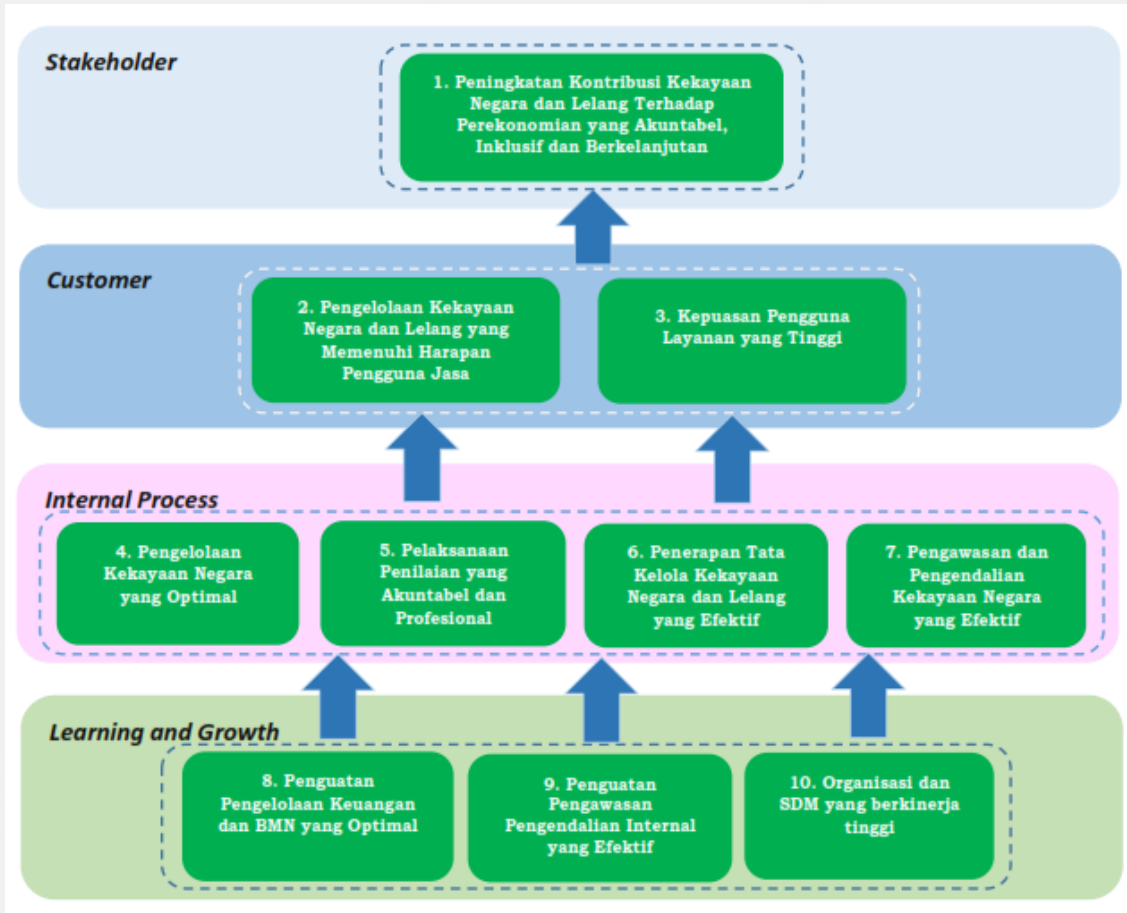
A. Ringkasan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi

Peta strategi adalah diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama yang dikejar oleh organisasi atau manajemen. Peta strategi dari KPKNL Pontianak yakni sebagai berikut:



Pada pertengahan Juni 2023, terdapat adendum peta strategi menjadi sebagai berikut:



2. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi. KPKNL Pontianak sebagai unit Eselon III (Kemenkeu Three) mempunyai 10 (sepuluh) sasaran strategis.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis. KPKNL Pontianak dalam pencapaian SS yang telah ditetapkan memiliki 19 (Sembilan belas) IKU yang harus dicapai.

Berikut Ringkasan Perjanjian Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2023 berikut adendumnya:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1a-CP)	100%
		Persentase produktivitas lelang (1b-CP)	80%
		Indeks Integritas	88,67
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang	Persentase realisasi pokok lelang (2a-CP)	100%

	Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase penurunan outstanding piutang negara (2b-CP)	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-N)	4,2
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP)	68%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (4b-CP)	100%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian (5a-CP)	15%
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online (6a-CP)	90%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (6b-CP)	100%
7.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (7a-CP)	86%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP)	100
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-CP)	100%
		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN (8c-CP)	25%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (9a-CP)	60
10.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (10a-CP)	100%
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (11a-CP)	80

4. Kegiatan Kerja

Kegiatan kerja dijabarkan oleh seksi-seksi dan subbagian umum yang ada pada KPKNL Pontianak dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran strategis (SS) sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk program-program tersebut dibagi ke beberapa seksi, meliputi:

a. Subbagian Umum

- 1). Melakukan pengawasan disiplin pegawai;
- 2). Membuat usulan kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala pegawai;
- 3). Membuat ijin cuti pegawai;
- 4). Membuat usulan pensiun pegawai;
- 5). Menyusun DIPA Anggaran;
- 6). Membayarkan tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KPKNL;
- 7). Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- 8). Melaksanakan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

- 9). Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - 10). Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - 11). Menyusun laporan SAPP;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 1). Melayani Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - 2). Menetapkan status penggunaan / penguasaan kekayaan negara;
 - 3). Menetapkan ijin pemanfaatan kekayaan negara;
 - 4). Menetapkan ijin penghapusan kekayaan negara;
 - 5). Menyajikan dokumen pengelolaan kekayaan negara yang terverifikasi;
 - 6). Menetapkan ijin pemindahtanganan kekayaan negara;
 - 7). Menginventarisasi BMN;
 - 8). Menata usahakan BMN;
 - 9). Melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Negara;
 - 10). Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- c. Seksi Piutang Negara
- 1). Melayani penyerahan Piutang Negara;
 - 2). Melakukan pemanggilan terhadap para debitur Piutang Negara
 - 3). Membuat Pernyataan Bersama (PB);
 - 4). Membuat PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara);
 - 5). Membuat Surat Paksa (SP);
 - 6). Melaksanakan penyampaian Surat Paksa;
 - 7). Melakukan Penyitaan barang jaminan;
 - 8). Melakukan usulan lelang barang jaminan debitur sebagai upaya pengurusan Piutang Negara.
 - 9). Melayani penjualan barang jaminan debitur di luar lelang;
 - 10). Melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan;
 - 11). Pemblokiran barang jaminan;
 - 12). Pencabutan pemblokiran barang jaminan;
 - 13). Penatausahaan pengeluaran/penyerahan dokumen asli barang jaminan;
 - 14). Penatausahaan BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara);
 - 15). Penatausahaan penyimpanan asli dokumen barang jaminan.
- d. Seksi Hukum dan Informasi
- 1). Memantau perkembangan BKPN;
 - 2). Menata usahakan hasil pengurusan piutang dan lelang negara;
 - 3). Menangani perkara hukum di Pengadilan;
 - 4). Menangani perkara ditingkat banding;
 - 5). Menangani perkara ditingkat kasasi;

- 6). Melakukan Penyetoran PNBPN, Hak Pihak Ketiga
 - 7). Menghimpun data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari bea lelang, biad PUPN, dan Pemanfaatan BMN.
 - 8). Melakukan Administrasi Bendahara Penerimaan
 - 9). Menyelenggarakan Administrasi Pengarusutamaan Gender
 - 10). Menyusun Laporan Kinerja
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- 1). Menyusun jadwal rencana pemantauan dan penggunaan sumber daya serta melaksanakan pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPKNL;
 - 2). Mengoordinasikan implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL;
 - 3). Melaksanakan pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 4). Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 5). Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 6). Menyiapkan bahan usulan penyusunan profil risiko Kantor Wilayah;
 - 7). Melakukan *monitoring* penanganan risiko;
 - 8). Menyusun konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan masyarakat;
 - 9). Menyusun laporan berkala kepatuhan internal sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kegiatan yang telah dirumuskan perlu dilengkapi indikator kinerja utama yang terdiri dari: *inputs* (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat) dan *impacts* (dampak). Indikator kinerja utama adalah merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/lakukan.

B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Waktu pelaksanaan perjanjian kinerja adalah sepanjang tahun 2023, dimulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Pada penghujung tahun 2023 19 (Sembilan belas) IKU yang diprogramkan pada tahun 2023 mencapai target dan bahkan melebihinya sehingga keseluruhan target kerja yang harus dilaksanakan KPKNL pada tahun 2023 telah tuntas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak

1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2023

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks (%)
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1a-CP)	100%	129.95%	129.95%
		Persentase produktivitas lelang (1b-CP)	80%	108.32%	135.40%
		Indeks Integritas (1c-CP)	88.67	89	100.56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang (2a-CP)	100%	133.87%	133.87%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara (2b-CP)	100%	185.97%	185.97%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-N)	4,2	4,68	111.43%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP)	68%	74.07%	108.92%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (4b-CP)	100%	138.95%	138.95%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP)	100%	127.78%	127.78%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian (5a-CP)	15%	0%	200%
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online (6a-CP)	90%	100%	111.11%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (6b-CP)	100%	106%	106.27%
7.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (7a-CP)	86%	93.84%	109.11%

8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP)	100	110	109,84%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-CP)	100%	132%	132%
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN (8c-CP)	25	0%	200%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (9a-CP)	60	97.43	162.38%
10.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (10a-CP)	100%	120%	120%
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (11a-CP)	80	99.17	123.94%

2. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1a-CP)	159.68%	105.94%	97.31%	106.78%	129.95%
		Persentase produktivitas lelang (1b-CP)**	32.05%	37.47%	37.66%	49.34%	108.32%
		Indeks Integritas (1c-CP)	-	-	-	-	89
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang (2a-CP)	77.69%	70.29%	128.08%	101.09%	133.87%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara (2b-CP)	-	275%	103.80%	273.73%	185.97%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-N)	4.70	4.81	4.85	4.87	4.68
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP)	-	105.78%	129.42%	130.53%	108.92%

		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (4b-CP)	100%	100.56%	106.78%	115.12%	138.95%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP)	-	112.22%	119.43%	147.27%	127.78%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian (5a-CP)	-	0	0	0	0
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online (6a-CP)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (6b-CP)	-	136.46%	121.92%	122%	106%
7.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (7a-CP)	-	88%	93.83%	94.83%	93.84%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP) **	95.67	97.54	96.67	95.93	109,84
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-CP)	-	-	-	183%	132%
		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (8c-CP)	0	0	0	0	0
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (9a-CP)	-	-	-	-	97.43
10.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (10a-CP)	-	120%	120%	120%	120%
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (11a-CP)	-	-	-	-	99.17

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	109,78%	105,43%	113,1%	115,41%	114.73%
--------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

** : Perhitungan IKU tersebut pada tahun 2023 memiliki formula yang berbeda dari tahun sebelumnya.

3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2023

Penjelasan atas capaian kinerja tahun 2023 yang telah dicapai KPKNL Pontianak adalah:

a. Sasaran Strategis (SS) : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1a-CP)

Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai 129.95%. Dari target awal sebesar Rp24.368.500.000, Adendum Pertama Rp29.122.813.267, Adendum Kedua Rp31.193.000.000, tercapai Rp37.845.640.196 dengan rincian yaitu:

- ❖ PNBPN Pengelolaan BMN memiliki realisasi 29.632.473.524 (119.49%) dari target setelah adendum terakhir sebesar Rp24.800.000.000;
- ❖ PNBPN Piutang Negara memiliki realisasi Rp69.364.041,00 (216.76%) dari target setelah adendum terakhir sebesar Rp32.000.000; dan
- ❖ PNBPN Lelang memiliki realisasi 8.143.802.631 (128.03%) dari target sebesar 6.361.000.000.

2) Persentase produktivitas lelang (1b-CP)

Persentase produktivitas lelang tercapai 108.32% dari target 80%. IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu produktivitas dari tiap jenis lelang dan Frekuensi pelaksanaan lelang.

Rincian Produktivitas dari tiap jenis lelang yaitu:

- ❖ Lelang Non Eksekusi Sukarela laku 80 lot dari total 87 lot atau tercapai 91,95% dari target 75%;
- ❖ Lelang Non Eksekusi Wajib laku 422 lot dari total 462 lot atau tercapai 91,34% dari target 55%;
- ❖ Lelang Eksekusi Hak Tanggungan laku 92 lot dari total 706 lot atau tercapai 13,03% dari target 5%; dan
- ❖ Lelang Eksekusi selain Hak Tanggungan laku 40 lot dari total 85 lot atau tercapai 47,06% dari target 25%.

Frekuensi Pelaksanaan Lelang selama tahun 2023 yaitu 1.049 kali dari target sebesar 949.

3) Indeks Integritas (1c-CP)

Indeks integritas tercapai 100,56%. Dari target 88,67 tercapai 89.

b. Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1) Persentase realisasi pokok lelang (2a-CP)

Capaian dari Persentase realisasi pokok lelang yaitu 133,87%, yaitu tercapai Rp274.430.457.684 dari target sebesar Rp205.000.000.000 dengan rincian yaitu:

❖ Pokok Lelang Kelas I tercapai Rp144.413.112.684 dari target Rp105.000.000.000 atau tercapai 137,54%; dan

❖ Pokok Lelang Pegadaian tercapai Rp130.017.345.000 dari target Rp 100.000.000.000 atau tercapai 130,02%.

2) Persentase penurunan *outstanding* piutang negara (2b-CP)

Persentase Penurunan *outstanding* piutang negara tercapai 185,97%. Dari Target awal sebesar Rp1.300.400.000 tercapai Rp2.418.320.700.

c. Sasaran Strategis (SS): Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-N)

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Pontianak tercapai 4,68 (skala 5) dari target sebesar 4,20 atau tercapai 111,43%.

d. Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP)

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai 74,07% dari target sebesar 68%. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan dengan bobot 75%, tercapai 69,26%. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya dengan bobot 25% tercapai 88,49% sehingga capaian totalnya yaitu 74,07%.

2) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (4b-CP)

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan memiliki target sebesar 285 unit dan tercapai 396 unit tanah atau tercapai 138,95%. IKU ini terdiri atas:

❖ Target K1 sebesar 25 NUP tercapai 180 NUP;

❖ Target K2 sebesar 47 NUP tercapai 13 NUP;

❖ Target K3 sebesar 112 NUP tercapai 108 NUP; dan

❖ Target K4 sebesar 101 NUP tercapai 95 NUP.

- 3) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP)
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tercapai 23 BKPN dari target awal sebesar 17, sehingga tercapai 127,78%.
- e. Sasaran Strategis (SS): Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
 - 1) Deviasi ketergunaan hasil penilaian (5a-CP)
Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai 0,00% atau tidak terdapat selisih dari target sebesar 15%.
- f. Sasaran Strategis (SS): Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
 - 1) Persentase pelaksanaan lelang online (6a-CP)
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai 100%. Dari 1.049 kali lelang selama tahun 2023, keseluruhannya telah menggunakan sistem e-Auction.
 - 2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (6b-CP)
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai 60 unit dari target sebanyak 56 unit atau tercapai 122%.
- g. Sasaran Strategis (SS): Penguatan Pengawasan – Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
 - 1) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (7a-CP)
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai 93,84% dari target sebesar 86% atau tercapai 109,11% dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ Dari 84 persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022, Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 78. Sehingga persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 92,86% dari target 86%; dan
 - ❖ Dari 62 persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023, Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 59. Sehingga persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 95,16% dari target 86%.

- h. Sasaran Strategis (SS): Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
- 1) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP)
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah tercapai 110 dari target 100 atau telah tercapai 109,84%.
 - 2) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-CP)
IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan telah tercapai 132% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
 - 3) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (8c-CP)
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tercapai 0% (tidak ada selisih) dari Target rata-rata Deviasi Data PNBP Lelang & Piutang 15%.
- i. Sasaran Strategis (SS): Penguatan Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif
- 1) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif tercapai 162,38%. Dari target 60 tercapai 97,43.
- j. Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
- 1) Persentase pengembangan kompetensi pegawai (10a-CP)
Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai 120% dari target sebanyak 100%. Dari total jumlah 26 bawahan, seluruhnya telah memenuhi kriteria bahkan seluruhnya melebihi kriteria.
 - 2) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
Review Kinerja pada KPKNL Pontianak mendapatkan skor 99,17 dari target skor yaitu 80 sehingga telah tercapai 124%.

4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU KPKNL Pontianak dari semua IKU yang ada secara umum telah tercapai lebih dari 100% sesuai dengan tabel capaian IKU di atas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antar realisasi dengan rencana atas semua indikator sasaran, sehingga dapat diperoleh informasi yang menyeluruh atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pencapaian sasaran ini merupakan cerminan/turunan dari evaluasi kinerja kegiatan yang tercantum dalam indikator sasaran strategis, sehingga alasan dari terlampauinya sasaran adalah sama dengan evaluasi kinerja kegiatan.

Dilihat dari persentase pencapaian target menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang ditetapkan KPKNL Pontianak pada tahun 2023 telah mencapai sasaran strategis yang digariskan. Hal ini dikarenakan:

- a) KPKNL Pontianak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesional dibidangnya;
- b) Adanya sinergi dari setiap bagian/seksi pada KPKNL Pontianak yang saling mengisi kekurangan yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan yang hampir sempurna (optimal);
- c) Adanya disiplin pegawai KPKNL Pontianak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan padanya dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada;
- d) Optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
- e) Adanya program keringanan utang membuat para debitur tertarik untuk menyelesaikan piutang-piutangnya.
- f) Koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk bersama-sama melakukan penagihan, penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan debitur dan barang jaminan
- g) Kolaborasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Pontianak untuk melakukan identifikasi dan verifikasi barang jaminan sehingga dapat dilakukan lelang barang jaminan
- h) Penggalian potensi utilisasi barang milik/kekayaan negara pada satuan-satuan kerja Kementerian/Lembaga, potensi lelang (Hak Tanggungan, penghapusan BMN, barang sitaan dan rampasan), serta potensi pengurusan piutang negara macet dan yang telah lama diserahkan;
- i) Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pengelolaan/penatausahaan BMN, pengurusan piutang negara dan lelang kepada *stakeholder* (pengguna jasa);
- j) Pelaksanaan *in-house training* dari Kantor Pusat DJKN, juga Diklat Teknis bagi pegawai KPKNL Pontianak untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang masing-masing;
- k) Adanya pengendalian internal di lingkungan KPKNL Pontianak yang mengawasi adanya tindakan kekurangan/kesalahan yang mungkin terjadi dalam memberikan pelayanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus;

5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya untuk mencapai tujuan yang merupakan implementasi dari visi dan misi yang diemban KPKNL Pontianak dapat dilihat dengan analisis dan evaluasi pencapaian sasaran. Dari analisis dan evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat bahwa KPKNL Pontianak:

- a) Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, penggalian potensi serta sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara oleh KPKNL terutama fungsi penatausahaan dan pemanfaatan BMN untuk dapat melampaui target utilisasi kekayaan negara yang telah ditetapkan;
- b) Mengembangkan dan meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tahun 2023 agar dapat mencapai bahkan melampaui target Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan perolehan Biaya Administrasi Piutang Negara (Biad) dari target yang ditetapkan;
- c) Menyenggarakan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan optimalisasi pelayanan lelang Tahun 2023 meskipun belum dapat mencapai target pendapatan Pokok Lelang dan Bea Lelang, namun untuk frekuensi lelang sudah jauh di atas target;
- d) Mendorong upaya optimalisasi pengurusan piutang dan lelang negara. Untuk mengoptimalkan pengurusan piutang dan lelang negara perlu dukungan baik dari segi administrasi data dan hukum serta jumlah SDM yang profesional dan andal;
- e) Melakukan upaya-upaya penggalian potensi lelang dari jenis-jenis lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Penghapusan Aset BUMN/BUMD dan Aset Pemerintah Daerah, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi secara korespondensi maupun kunjungan langsung kepada pihak terkait (*stakeholders*).
- f) Menyebarluaskan informasi mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang dengan menggunakan media-media yang ada, agar informasi tentang lelang dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap dan komprehensif.

B. Realisasi Anggaran

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan maka terdapat Realisasi Anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0
2. Belanja Barang	2.127.438.000	1.913.157.131	89,93%
3. Belanja Modal	221.968.000	192.600.000	86,77%
Jumlah	2.349.406.000	2.105.757.131	89,63%

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan. Dengan dana yang dianggarkan tersebut, KPKNL Pontianak mampu mencapai Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran 110 dari target yang telah ditentukan sebesar 100, sehingga capaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai target 109,84%.

C. Prestasi dan Penghargaan

Selama Tahun 2023, KPKNL Pontianak berhasil mendapat berbagai Prestasi dan Penghargaan diantaranya:

1. Juara 1 PUG Tingkat DJKN
2. 5 Besar PUG Tingkat Kementerian Keuangan
3. Penghargaan Nilai Kinerja Organisasi Terbaik Tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat
4. Penghargaan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat
5. Penghargaan Penurunan *Outstanding* Piutang Negara Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat
6. Penghargaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat
7. Penghargaan Gubernur Kalimantan Barat atas Kerjasama dan Dukungan dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
8. Penghargaan Terbaik I Pelaksanaan Anggaran Pagu s.d. 3 Milyar Tahun Anggaran 2021 dari KPPN Pontianak
9. Penghargaan atas Kerjasama dan dukungan dalam Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Penindakan Kepabeanan Tahun Anggaran 2021 dari Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
10. Peringkat 3 Satker dengan transaksi dan nominal terbanyak penggunaan Digipay tingkat wilayah lingkup kementerian keuangan Provinsi Kalimantan Barat Semester I 2023 dari Kanwil DJPb Kalimantan Barat
11. Penghargaan atas Sinergi Pengelolaan BMN pada Kantor Bea Cukai Nanga Badau
12. Penghargaan atas Fasilitasi Penyelesaian Piutang Negara DPM-LUEP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan Pencapaian IKU

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Pontianak senantiasa berpegang pada visi dan misi yang diemban oleh DJKN serta Kementerian Keuangan. KPKNL Pontianak senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program yang telah ditentukan yang merupakan tugas dan wewenang KPKNL Pontianak, guna mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2023 yang sangat berpengaruh pada kinerja KPKNL Pontianak namun berbagai upaya telah dilakukan dan menghasilkan ketercapaian pada semua IKU yang ditargetkan untuk KPKNL Pontianak. Dari hasil analisis kegiatan dalam mencapai sasaran yang dikemukakan pada BAB sebelumnya dapat dikatakan kinerja KPKNL Pontianak untuk tahun 2023 telah **berhasil** dan tergolong dalam kategori **sangat baik** dengan skor Nilai Kinerja Organisasi mencapai **114,73%**.

B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja

Target IKU KPKNL Pontianak telah tercapai, meskipun demikian masih adanya kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai sasaran tersebut antara lain:

- 1). Pada capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran beban kinerja yang tersaji melalui Rincian Output (RO) di tiap seksi dan MAK Umum cukup tinggi, sementara dukungan anggaran perlu memerhatikan capaian efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa RO yang sudah tidak dapat terakomodasi dengan dukungan anggaran

- 2). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal
- 3). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.
- 4). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN akan sulit tercapai.
- 5). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBPN.
- 6). Letak barang jaminan Piutang Negara tidak dapat teridentifikasi secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai.
- 7). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 8). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 9). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 10). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
- 11). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
- 12). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
- 13). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 14). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.

- 15). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 16). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.
- 17). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 18). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena sangat tergantung permohonan dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 19). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan e-auction masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.
- 20). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat gugatan perdata, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang. Sebagian putusan pengadilan menyatakan pembatalan risalah lelang sehingga risiko hukum ini menjadi kendala bagi KPKNL Pontianak dalam melaksanakan proses lelang.
- 21). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut di masa mendatang dalam rangka perbaikan, antara lain KPKNL perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di bebankan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia

- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA,PPK,PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbauan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;
- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.
- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan stakeholder terkait pelayanan pada KPNKLN Pontianak

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dan Kantor Pusat DJKN maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

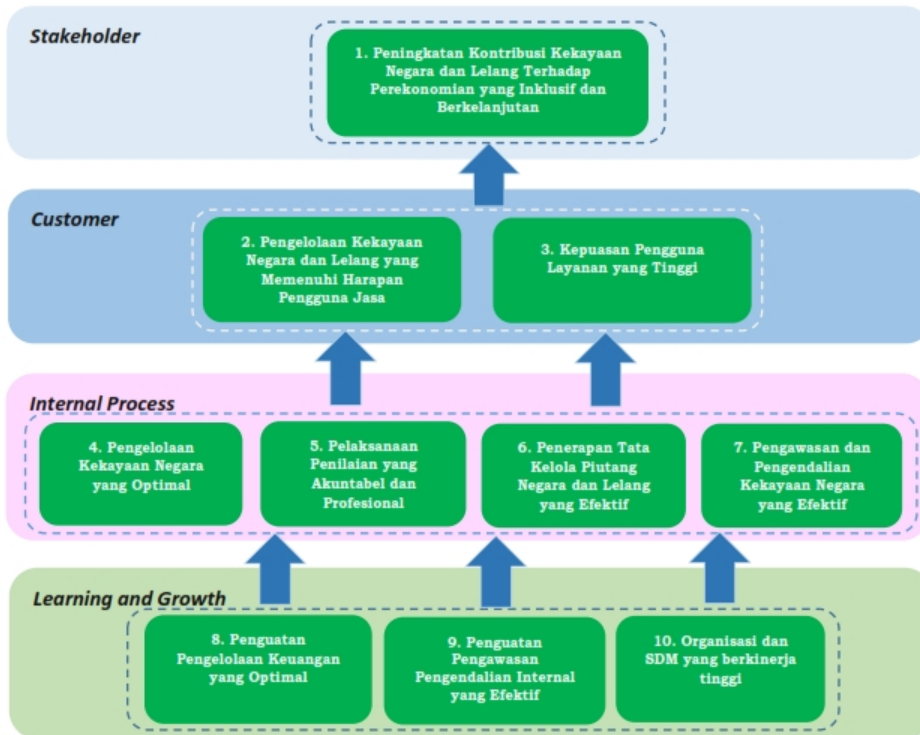
LAMPIRAN
KPKNL
PONTIANAK



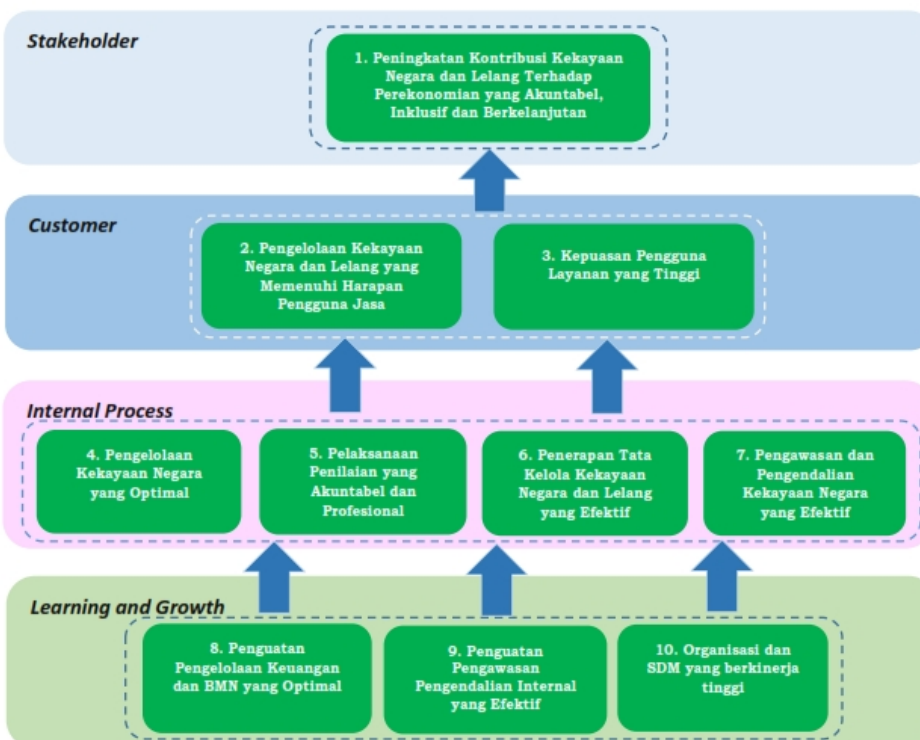
ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-01A/WKN.11/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.11/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
Stakeholder perspective						Stakeholder perspective					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
Internal process perspective						Internal process perspective					
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
Learning and growth perspective						Learning and growth perspective					
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang optimal					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal				

b. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
9a-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67
Internal process perspective						Learning and growth perspective					
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

c. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis dan Perubahan Nama IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	sd Q3	Q4	Y			Q3	sd Q3	Q4	Y
Internal process perspective						Internal process perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
4c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

d. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Pontianak

e. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

Pontianak, 27 September 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Constantinus Chrisnan Soegihherprajoko		NAMA	Tetik Fajar Ruwandari
NIP	19700312 199603 1 001		NIP	19760822 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	12,6%	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
3.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	46,48%	Penerima Layanan

5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	8,38%	Penerima Layanan
6.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,2	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	44,64%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	38,89%	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	55,36%	Proses Bisnis
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

1	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase Pelaksanaan Kolaborasi Pengamanan Penerimaan Negara Melalui Tindakan Aktif Penagihan dan Penjualan Barang Sitaan Pajak Melalui Lelang	100%	Learning & Growth
		Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu Kalimantan Barat	100%	Learning & Growth
2	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Administrator	90	Learning & Growth
3	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Persentase Pemenuhan Pembangunan ZI-WBBM	100%	Penguatan Internal

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan
---	------------------------

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

27 September 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Constantinus Chrisnan Soegherprajoko

19700312 199603 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	31 pegawai
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	



1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang				7,57%	7,57%	12,6%	12,6%
	2	Persentase Produktivitas Lelang				80%	80%	80%	80%
	3	Indeks Integritas						88,67	88,67
	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang				32,54%	32,54%	46,48%	46,48%
	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				5,03%	5,03%	8,38%	8,38%
	6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,2	4,2
	7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				55%	55%	68%	68%
	8	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan				26,78%	26,78%	44,64%	44,64%
	9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)				23,33%	23,33%	38,89%	38,89%
	10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				25%	25%	25%	25%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Online				78,5%	78,5%	90%	90%	
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				41,52%	41,52%	55,36%	55,36%	

13	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara						86%	86%
14	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran				100	100	100	100
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan						100%	100%
16	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN				15%	15%	15%	15%
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
18	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				75%	75%	100%	100%
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

27 September 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Constantinus Chrisnan Soegihprajoko

19700312 199603 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK
PERIODE DESEMBER
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							34,06%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							113,52%	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	129,95%	14%	30%	129,95%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	108,32%	14%	30%	135,40%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)							23,14%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	133,87%	14%	50%	133,87%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	185,97%	14%	50%	185,97%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							111,43%	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,2	4,68	21%	100%	111,43%	111,43%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28,38%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							116,31%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	74,07%	14%	33%	108,92%	108,92%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/M	100%	138,95%	14%	33%	138,95%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	127,78%	14%	33%	127,78%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	15%	0%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							108,69%	
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	P/M	90%	100%	14%	50%	111,11%	111,11%	hijau
6b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	106%	14%	50%	106,27%	106,27%	hijau
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							109,11%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	93,84%	14%	100%	109,11%	109,11%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,15%	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							109,84%	
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	110	14%	33%	109,84%	109,84%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	132%	14%	33%	132,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	25%	0%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	97,43	14%	100%	162,38%	120,00%	hijau
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							120,00%	
10a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
10b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99,17	14%	50%	123,96%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,73%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Pontianak



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegihprajoko
NIP 19700312 199603 1 001

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Kantor Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Usman Arif Murtopo
NIP 19760428 199602 1 001



LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2023	Target Addendum Q3 2023	Target Addendum Q4 2023	Realisasi						
							Q1	Q2	Q3	Q4			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan												
	1a-CP	P/M	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
	a.		PNBP Pengelolaan BMN	Rp18.000.000.000	Rp22.742.313.267	Rp24.800.000.000	Rp6.390.651.547	Rp21.742.313.267	Rp24.769.482.130	Rp29.632.473.524			
	b.		PNBP Piutang Negara	Rp8.500.000	Rp19.500.000	Rp32.000.000	Rp7.753.638	Rp17.102.078	Rp31.223.481	Rp69.364.041			
	c.		PNBP Lelang	Rp6.360.000.000	Rp6.361.000.000	Rp6.361.000.000	Rp2.134.922.667	Rp3.691.266.392	Rp5.357.024.086	Rp8.143.802.631			
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp24.368.500.000	Rp29.122.813.267	Rp31.193.000.000	Rp8.533.327.852	Rp25.450.681.737	Rp30.157.729.697	Rp37.845.640.196			
	Capaian IKU						35,018%	104,441%	103,55%	129,95%			
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
			Jenis Lelang	Target			Capaian	Capaian (Maks 105%)	Capaian	Capaian (Maks 105%)	Capaian	Capaian (Maks 105%)	
			Non Eksekusi Sukarela	75%			123%	105%	123%	105%	123%	105%	
			Non Eksekusi Wajib	55%			166%	105%	166%	105%	166%	105%	
			Eksekusi HT	5%			261%	105%	261%	105%	261%	105%	
			Eksekusi Selain HT	25%			188%	105%	188%	105%	188%	105%	
			Realisasi Lot Lelang (40%)				42,00%	42,00%	42,00%	42,00%			
		Frekuensi Lelang	Target			Realisasi	Capaian (Maks 105%)	Realisasi	Capaian (Maks 105%)	Realisasi	Capaian (Maks 105%)		
		Jumlah Frekuensi Lelang	949			227	24%	395	42%	627	66,07%	1.049	110,54%
		Realisasi Frekuensi Lelang (60%)				14,35%	24,97%	39,64%	66,32%				
Capaian IKU						56,35%	66,97%	81,64%	108,32%				
1c-CP	P/L	Indeks Integritas	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4				
		Target/Realisasi	88,67						89,17				
Capaian IKU									100,56%				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa												
	2a-CP	P/M	Persentase realisasi pokok lelang	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
			Pokok Lelang Kelas I	Rp105.000.000.000			Rp49.516.971.582	Rp83.392.308.581	Rp102.471.973.024	Rp144.413.112.684			
			Pokok Lelang Pegadaian	Rp100.000.000.000			Rp10.669.011.000	Rp26.316.470.200	Rp72.579.316.300	Rp130.017.345.000			
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp205.000.000.000			Rp60.185.982.582	Rp109.708.778.781	Rp175.051.289.324	Rp274.430.457.684			
	Capaian IKU						29,36%	53,52%	85,39%	133,87%			
2b-CP	P/M	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4				
		Target/Realisasi	Rp280.000.000	Rp725.000.000	Rp1.300.400.000	Rp77.536.362	Rp664.254.419	Rp1.300.344.225	Rp2.418.320.700				
CAPAIAN IKU						27,69%	237,23%	179,36%	185,97%				
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi												
	3a-N	E/M	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
			Target/Realisasi	4,2						4,68			
CAPAIAN IKU									111,43%				
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal												
	4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
			a. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan	Bobot 75%				79,83%	82,89%	69,26%			
			b. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya	Bobot 25%				92,61%	88,60%	88,49%			
	Capaian IKU						83,03%	84,32%	74,07%				
	4b-CP	P/M	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK			Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4			
		K1	25				7	70	180				
		K2	47				42	45	13				

			K3		112				0	0	108		
			K4		101				328	328	95		
			Total Target & Realisasi		285				377	443	396		
			Capaian						132,28%	155,44%	138,95%		
	4c-CP	P/M	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Target/Realisasi		17	18	18		0	11	16	23	
			Capaian IKU						0,00%	64,71%	88,89%	127,78%	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional												
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian		MIN/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Target/Realisasi		25%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Capaian IKU						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif												
	6a-CP	P/M	Persentase Pelaksanaan Lelang Online		MAX/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Persentase pelaksanaan permohonan lelang online		86%								
			Jumlah permohonan lelang melalui modul lelang online						138	267	400	654	
			Jumlah permohonan lelang						138	267	400	654	
			Capaian lelang online						100,00%	100,00%	100%	100%	
			Lelang E-Auction & E-Conventional Auction		94%								
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction						227	395	627	1049	
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction						-	-	-	-	
			Jumlah Frekuensi Lelang						227	395	627	1049	
			Capaian Lelang E-Auction & E-Conventional Auction						100,00%	100,00%	100%	100%	
			Capaian IKU						100,00%	100,00%	100%	100%	
	6b-CP	P/M	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)		MAX/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya										
			Target/Realisasi		51				25	25	36	55	
			Capaian						39,22%	39,22%	56,47%	86,27%	
			Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker										
			Target/Realisasi		5				0	3	5	5	
			Capaian						0%	12%	20%	20%	
			Capaian IKU						39,22%	51,22%	76,47%	106,27%	
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif												
	7a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara		MAX/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		86					78	78	78	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L								8	37	59
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022								84	84	84
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023								62	62	62
			Capaian IKU						#DIV/0!	59%	78,77%	93,84%	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal												
	8a-CP	P/M	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		MAX/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Target/Realisasi		95,5%	100	100		98,58%	99,07%	99,03%	96,73%	
			Capaian IKU						103,23%	103,74%	120	109,84	
	8b-CP	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		MAX/AVG				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
			Target/Realisasi		100%							132%	
			Capaian IKU									132%	
	8c-CP	P/M	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		MIN/TLK				Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4	
			Rata-Rata Deviasi Data PNBPN Lelang & Piutang		15%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Capaian IKU						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif												

KPKNL
PONT ANAK

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**

